

# GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	BERITA BUANA	6	08-08-2002

## Buntu, Perundingan Pertamina-Exxon di Cepu

### Jakarta, Buana

Pertamina dan ExxonMobil masih belum mencapai kesepakatan dalam pengelolaan ladang minyak Cepu, Jawa Tengah yang akan berakhir tahun 2010. ExxonMobil masih belum menyetujui dua prasyarat yang diajukan Pertamina.

"Sampai saat ini pihak Exxon masih belum memberikan jawabannya terhadap dua prasyarat yang ditawarkan Pertamina," kata Direktur Hulu Pertamina, Iin Arifin Takhyan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/8).

Menurutnya, agar masalah perpanjangan kontrak tersebut dapat segera dituntaskan, DKPP (Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina) akan melakukan tindakan. Apalagi, katanya, Pertamina sudah melakukan studi independen menelaah masalah ini, di mana hasilnya bisa menjadi dasar menuntaskan persoalan tersebut. "Percayalah, Pertamina pasti menginginkan soal ini cepat tuntas," tegas Iin.

Dua prasyarat yang diajukan Pertamina adalah diperbesarnya *equity* Pertamina di Cepu. Ke-

dua, berdasarkan perpanjangan yang akan dilakukan sebelum tahun 2010 itu. Pertamina meminta bonus *cash*. Dua prasyarat ini yang dibawa Pertamina saat berunding dengan pihak Exxon untuk memperpanjang kontrak. "Kita inginkan dua prasyarat itu bisa dilakukan," papar Iin.

Cepu sendiri merupakan ladang yang cukup potensial dan awalnya ladang yang dimiliki bersama antara Humpuss dan Pertamina. Namun tahun 2000, Exxon mengambil alih dari Humpuss, yang kemudian melalui anak perusahaannya, ExxonMobil Cepu, melakukan eksplorasi lagi.

Dari hasil eksplorasi itu kemudian diketahui ladang Cepu memiliki deposit minyak sebanyak 2 miliar barel. Karena masih belum memperoleh nilai ekonomis, maka ExxonMobil meminta pada Pertamina agar kontrak yang sedianya habis tahun 2010 diperpanjang lagi. "Soal perpanjangan itu Pertamina tentu ingin menunggu konfirmasi dari Exxon dulu," kata Iin.

Sementara itu, gugatan warga sipil Aceh pada Exxon — yang

dianggap telah memfasilitasi militer Indonesia di ladang perusahaan minyak itu — ditolak Pemerintah AS lewat permintaannya terhadap hakim Federal. Pemerintah AS menilai keputusan itu dapat membuat hubungan bilateral dengan Indonesia terganggu.

Surat permintaan Menlu AS itu dikirimkan 29 Juli lalu ke Pengadilan Distrik di Washington. "Terdapat risiko serius yang dapat mempengaruhi kepentingan AS," tulis Menlu Colin Powell. Seperti diketahui, 11 warga sipil Aceh sudah mengajukan gugatan pada ExxonMobil karena perusahaan minyak multinasional ini dituduh telah memfasilitasi militer Indonesia. Mereka yang menggugat adalah korban kekerasan militer Indonesia.

Sebagaimana hukum AS, warga negara asing dapat mengajukan tuntutan melalui pengadilan AS terhadap perusahaan-perusahaan AS yang diindikasikan terlibat kekerasan dan melanggar hukum internasional. Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya telah mengajukan keberatan atas gugatan itu. □ sab